

Landasan Pendidikan
Modul Pembelajaran
Fakultas Seni Keagamaan
IAKN Ambon



Oleh:

Thobias Sarbunan, M.Pd

02 Oktober 2020

BAB I

Pendahuluan tentang Perubahan Pendidikan Nasional

Ilmu pastinya mengalami perubahan, alias dinamis tidak statis. Hal ini terlihat dalam sistem pendidikan di Indonesia ternyata telah mengalami banyak perubahan. Perubahan-perubahan itu terjadi karena telah dilakukan berbagai usaha pembaharuan dalam pendidikan. Akibat pengaruh itu pendidikan semakin mengalami kemajuan (Welcome to Digilib UIN Sunan Ampel Surabaya - Digilib UIN Sunan Ampel Surabaya, n.d.).

Perkembangan itu terjadi karena terdorong adanya pembaharuan tersebut, sehingga di dalam pengajaranpun guru selalu ingin menemukan metode dan peralatan baru yang dapat memberikan semangat belajar bagi semua siswa. Pembangunan di bidang pendidikan barulah ada artinya apabila dalam pendidikan dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan bangsa Indonesia yang sedang membangun. Pada hakekatnya kegiatan belajar mengajar adalah suatu proses interaksi atau hubungan timbal balik antara guru dan siswa dalam satuan pembelajaran.

Guru mengemban tugas yang berat untuk tercapainya tujuan pendidikan nasional yaitu meningkatkan kualitas manusia Indonesia, manusia seutuhnya yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, berdisiplin, bekerja keras, tangguh, bertanggung jawab, mandiri, cerdas dan terampil serta sehat jasmani dan rohani, juga harus mampu menumbuhkan dan memperdalam rasa cinta terhadap tanah air, mempertebal semangat kebangsaan dan rasa kesetiakawanan sosial.

Untuk itu dibutuhkan suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru dengan upaya membangkitkan Prestasi belajar siswa, misalnya dengan membimbing siswa untuk terlibat langsung dalam kegiatan yang melibatkan siswa serta guru yang berperan sebagai pembimbing untuk menemukan konsep keilmuan yang sejalan dengan falsafah keilmuan. Siswa yang berprestasi untuk belajar sesuatu akan menggunakan proses kognitif yang lebih tinggi dalam mempelajari materi itu, sehingga siswa itu akan menyerap dan mengendapkan materi itu dengan lebih baik.

Tugas penting guru adalah merencanakan bagaimana guru mendukung Prestasi siswa Untuk itu sebagai seorang guru disamping menguasai materi, juga diharapkan dapat menetapkan dan melaksanakan penyajian materi yang sesuai kemampuan dan kesiapan anak, sehingga menghasilkan penguasaan materi yang optimal bagi siswa.

Rancangan dasar sistem persekolahan di seluruh negara-negara berkembang yang baru dimerdekakan di paruh pertama [Abad 20] oleh para penjajah, termasuk Indonesia, itu tidak pernah berubah secara berarti hingga dua dekade pertama abad tersebut (Rosyid & Ekowanti, 2018).

Kita menderita semua pengaruh buruk industrialisasi sebagai bagian dari pembaratan sebagai proses penjajahan, justru karena kita mengadopsi instrumennya yang paling canggih, yaitu sistem persekolahan massal dengan obsesi mutu berbasis standard sebagai mantra sihirnya. Kenyataan sosial yang kasat mata adalah buah dari penanaman nilai-nilai serta pembiasaan-pembiasaan yang dibudayakan melalui sistem pendidikan nasional kita.

Persoalan yang menghinggapi sistem pendidikan nasional kita saat ini adalah kegagalan kita membedakan antara pendidikan dan persekolahan. Di lain sisi, belajar adalah sebuah proses sederhana yang tidak memerlukan setting persekolahan yang formal dan kaku. Kelas tertutup (dan berpendingin) adalah tempat belajar terburuk bagi mereka. Fokus pendidikan kita ke depan dengan demikian adalah memastikan bahwa anak-anak kita trampil dan senang belajar terutama melalui kesempatan mencoba hal-hal baru di luar ruang dan di masyarakat.

Kesempatan memberi seminar di depan kelas dengan berbagai topik yang menarik, aktual dan dekat dengan kehidupan sehari-hari akan menentukan apakah warga muda belajar dengan baik untuk menjadi warga masyarakat yang sehat dan produktif.

1.1. Pilar Pendidikan Nasional

Di dalam pendidikan Indonesia secara umum, dilandasi oleh pilar atau fondasi yang mengutakan semnatag, system, dan tujuan pendidikan secara komprehensif. Pembelajaran sembilan pilar menawarkan sebuah sistem pendidikan karakter yang sistematis, terukur, dan fleksibel untuk kegiatan siswa di sekolah. Program ini sangat baik dijalankan bagi institusi pendidikan yang berkomitmen untuk mendidik hard skill dan soft skill siswa sebagai tugas utama sekolah (Yusuf, 2019).

Selanjutnya, penyelenggaraan pendidikan di sekolah dilakukan oleh siswa, guru, kepala sekolah, orangtua dan pemimpin institusi pendidikan yang harus saling bekerja sama untuk mensukseskan program sembilan pilar. Pengembangan ini tidak jauh beda dengan pembuatan Program Tahunan (Prota) dan Program Semester (Promes) untuk menentukan materi dan metode apa yang akan diajarkan. Hal inilah yang sangat penting bagi penyelenggara pendidikan, karena harus memilih keahlian apa yang harus dikuasai oleh siswa dengan mempertimbangkan materi subjek mata pelajaran lain dan kegiatan siswa yang berkaitan dengan pembentukan karakter. Hal ini disebut dengan integrated learning.

Lebih mengerucut, belajar dapat diartikan sebagai proses yang ditandai adanya perubahan pada diri seseorang yang terjadi karena hasil pengalaman, latihan-

latihan dan interaksi dengan lingkungan yang melibatkan proses kognitif melalui penambahan, perluasan dan pendalaman pengetahuan, nilai dan sikap serta keterampilan, dimana perubahan tersebut relatif menetap dan bertahan lama.

Penyelenggaraan pendidikan di sekolah dilakukan oleh siswa, guru, kepala sekolah, orangtua dan pemimpin institusi pendidikan yang harus saling bekerja sama untuk mensukseskan program sembilan pilar:

Tabel 1:

Sembilan Pilar Pendidikan Nasional

Sembilan Pilar Pendidikan Nasional	
a)	Dalam pilar pendidikan nasional, terdiri dari Sembilan pilar yang tercakup pada:
b)	Knowledge & Character (Mengarahkan pembentukan pola pikir dan karakter);
c)	Self Mastery (Penguasaan kontrol diri);
d)	Intellectual Capacity (Kecakapan proses berpikir);
e)	Interpersonal and Communication Skill (Membangun kesadaran berinteraksi dan menyampaikan gagasan);
f)	Leadership (Membangun jiwa kepemimpinan);
g)	Foreign Language Proficiency (Peningkatan kemampuan berbahasa Inggris);
h)	Entrepreneurship and Social Entrepreneurship (Pengembangan jiwa kewirausahaan);
i)	History of World Civilization (Penguatan wawasan sejarah peradaban dunia);
j)	Nationalism and Democracy (Penanaman jiwa nasionalisme dan demokrasi).

1.2. Transformasi Badan Pendidikan

Di dalam sifat transformasi, ada beberapa segi yang dapat digali; hal yang paling mendasar untuk diperhatikan salah satunya yaitu kurikulum. Menurut (Prastowo, 2020), Perubahan kurikulum sekolah atau madrasah sudah tidak asing lagi di dunia pendidikan. Setidaknya dalam sejarah pendidikan dasar dan menengah di Indonesia 10 kursus telah digunakan. Adapun sepuluh kursus, Kursus dari era pasca kemerdekaan, hingga saat ini antara lain:

Table 2:

Transformasi Kurikulum Jilid Pertama

Rencana pelajaran 1947	Kurikulum 1952	Kurikulum 1964	Kurikulum 1968	Kurikulum 1975/1976

Table 3:
Transformasi Kurikulum Jilid Kedua

Kurikulum 1984	Kurikulum 1994	kurikulum 2002 dan 2004	KTSP 2006	Kurikul um 2013
-------------------	-------------------	----------------------------	--------------	-----------------------

Perubahan dan perkembangan-merupakan masalah yang sangat penting. Dengan keterkaitannya pada kurikulum. Serta dengan segala perkembangan tersebut, maka ditekankan pada upaya untuk selalu menyesuaikan dengan kebutuhan zaman untuk diperkuat Dan beberapa hasil kajian internasional tentang kemampuan pelajar Indonesia pada taraf internasional yang secara konsisten rendah atau bahkan sangat rendah. Hal tersebut semakin memperkuat ambisi pemerintah untuk merekonstruksi dan mengembangkan reformasi yang melahirkan pengembangan kurikulum 2013. Atau dengan cermat mengevaluasi hasil kualitas implementasi terhadap konstruksi kurikulum.

Selain itu, sejak [Juli 2013-KURTI/ kurikulum 2013] menjadi patokan pada jenjang kelas [I, IV, VII dan X] yang telah diidentifikasi sebagai level percontohan implementasi kurikulum tersebut di banyak sekolah (Biro Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan Penjaminan mutu pendidikan Kemendikbud, 2013: 3). Pelaksanaan [kurikulum 2013] secara simultan dengan didasari pada [Surat Edaran Direktur Pendidikan Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2013 Tidak. SE / Dj.I / PP.00 / 50/2013; Dirjen Pendis Kemenag RI, 2013] yang ditandatangani oleh Dirjen Pendis dengan mempertimbangkan terhadap persiapan dan kesiapan personel pada [8 Juli 2013]. Serta diharmoniskan dengan anggaran Kementerian Agama baru dimulai pada tahun ajaran 2014/2015. Yang pastinya hanya pada awalnya di kategori [I, IV, VII dan X].

Kondisi Saat Ini (KTSP)		Konsep Ideal	
A. Kompetensi Lulusan		A. Kompetensi Lulusan	
1	Belum sepenuhnya menekankan pendidikan	1	Berkarakter mulia
2	Belum menghasilkan keterampilan sesuai kebutuhan	2	Keterampilan yang relevan
3	Pengetahuan-pengetahuan lepas	3	Pengetahuan-pengetahuan terkait
B. Materi Pembelajaran		B. Materi Pembelajaran	
1	Belum relevan dengan kompetensi yang dibutuhkan	1	Relevan dengan materi yang dibutuhkan

Figur 1:
Perbandingan Sintesa Kelulusan

2	Beban belajar terlalu berat	2	Materi esensial
3	Terlalu luas, kurang mendalam	3	Sesuai dengan tingkat perkembangan anak
C. Proses Pembelajaran		C. Proses Pembelajaran	
1.	Berpusat pada guru	1.	Berpusat pada peserta didik
2.	Proses pembelajaran berorientasi pada buku teks	2.	Sifat pembelajaran yang kontekstual
3.	Buku teks hanya memuat materi bahasan	3	Buku teks memuat materi dan proses pembelajaran, sistem penilaian serta kompetensi yang diharapkan
D. Penilaian		D. Penilaian	
1.	Menekankan aspek kognitif	1.	Menekankan aspek kognitif, afektif, psikomotorik secara proporsional
2.	Tes menjadi cara penilaian yang dominan	2.	Penilaian tes pada portofolio saling melengkapi
E. Pendidik dan Tenaga Kependidikan		E. Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
1.	Memenuhi kompetensi profesi saja	1.	Memenuhi kompetensi profesi, pedagogi, sosial, dan personal
2.	Fokus pada ukuran kinerja	2.	Motivasi mengajar
F. Pengelolaan Kurikulum		F. Pengelolaan Kurikulum	
1.	Satuan pendidikan mempunyai pembebasan dalam pengelolaan kurikulum	1.	Pemerintah pusat dan daerah memiliki kendali kualitas dalam pelaksanaan kurikulum di tingkat satuan pendidikan
2.	satuan pendidikan, kebutuhan peserta didik, dan potensi daerah	2.	Satuan pendidikan mampu menyusun kurikulum dengan mempertimbangkan kondisi satuan pendidikan, kebutuhan peserta didik, dan potensi daerah
3.	Pemerintah hanya menyiapkan sampai standar isi mata pelajaran	3.	Pemerintah menyiapkan semua komponen kurikulum sampai buku teks dan pedoman

Figur 2:
Lanjutan



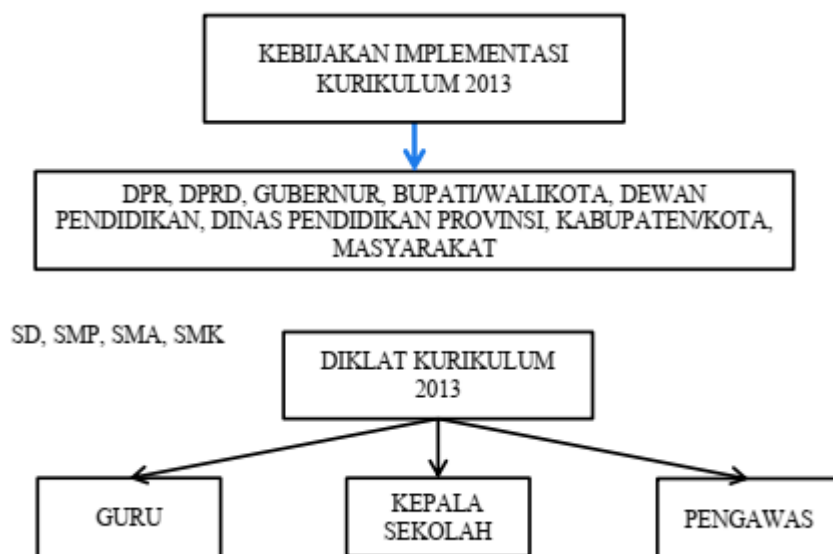
Figure 3:
Sebelum dan Sesudah Transformasi Kurikulum 2013

Tabel 4:
Karakteristik Kurikulum 2013

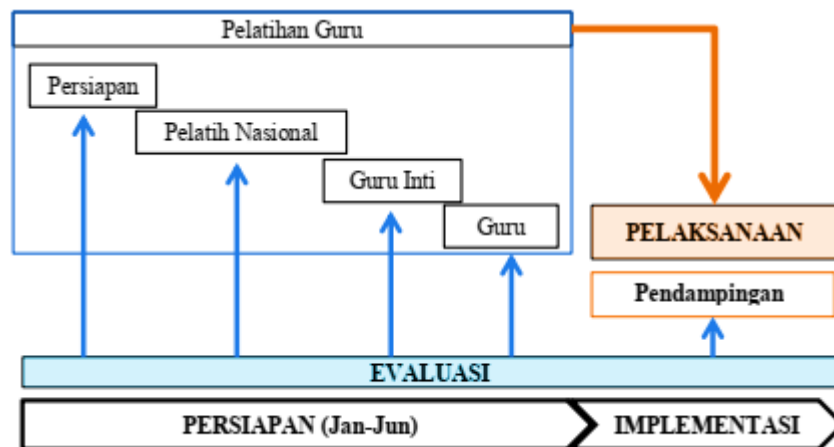
a)	Mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik
b)	Sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana di mana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar
c)	Mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat
d)	Memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan
e)	Kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran
f)	Kompetensi inti kelas menjadi unsur pengorganisasi (<i>organizing elements</i>) kompetensi dasar, di mana semua kompetensi dasar dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi inti
g)	Kompetensi dasar dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat (<i>reinforced</i>) dan memperkaya (<i>enriched</i>) antarmata pelajaran dan jenjang pendidikan (organisasi horizontal dan vertikal)

Table 5:
Empat Elemen Utama dalam Kurikulum 2013

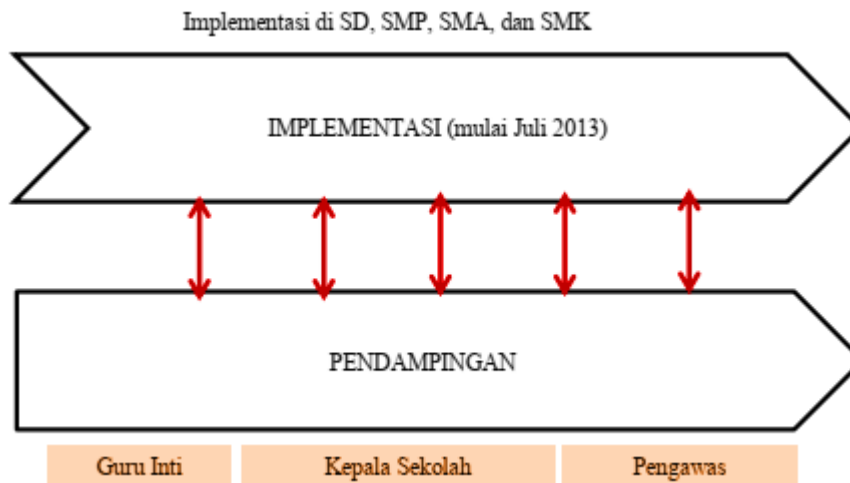
a)	Standar kompetensi lulusan
b)	Standar proses
c)	Standar isi
d)	Standar penilaian



Figur 4:
Strategi Implementasi Kurikulum 2013



Figur 5:
Rencana Implementasi Kurikulum 2013



Figur 6:
Proses Pelaksanaan Kurikulum 2013 DIKMENAS
Pendidikan Dasar-Menengah-Atas

BAB II

Pendidikan Nasional

Di dalam tinjauan (Devinta et al., 2017) dengan keterkaitan pada landasan pendidikan nasional, secara epistemologi atau teori pengetahuan yang berhubungan dengan hakikat dari ilmu pengetahuan, pengandaian-pengandaian, dasar-dasarnya serta. Pengetahuan tersebut diperoleh manusia melalui akal dan panca indra dengan berbagai metode, diantaranya: metode induktif, metode deduktif, metode positivism [positivisme ialah bahasa filsafat bermakna sebagai suatu peristiwa yang benar-benar terjadi, yang dapat dialami sebagai suatu realitas], metode kontemplatis dan metode dialektis. Pada dasarnya, epistemologi yang bertalian erat dengan filsafat atau landasan berpikir serta akar segala ilmu pengetahuan,

Selanjutnya, ditekankan bahwa epistemologi atau teori pengetahuan ialah teori tentang pengetahuan. Secara terminologi atau istilahnya epistemologi adalah teori mengenai hakikat ilmu pengetahuan atau ilmu filsafat tentang pengetahuan. Artinya pertanyaan epistemologi dapat menggambarkan; makna pengetahuan yang memiliki arti yaitu nilai tahu manusia.

Untuk itu, implikasi dari segi epistemologi dalam implementasinya pada dunia pendidikan yaitu:

- a) Epistemologi idealisme: Epistemologi idealisme ini meniscayakan kurikulum yang digunakan dalam pendidikan pun lebih berfokus pada isi secara objektif menyediakan beragam pengalaman belajar sebanyak-banyaknya, pada subjek didik untuk mampu menggerakkan jiwanya pada ragam realitas yang akan menjadikan cara berfikir dan analisisnya terhadap keseluruhan realitas pengalamannya;
- b) Epistemologi realisme: Epistemologi pendidikan dalam realisme adalah proses ilmiah yang ditujukan pada hal-hal yang beraneka ragam persoalan pendidikan seperti mengenai realitas peserta didik, pendidik, dan isi pendidikan, strategi dan lain sebagainya yang dapat digunakan oleh seseorang atau sekelompok orang sebagai dasar utama dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan;
- c) Epistemologi pragmatisme: Jadi nilai pengetahuan dilihat dari kadar instrumentalitannya yang akan membawa pada akibat-akibat, baik yang, setelah atau yang akan dihasilkan oleh ide pikiran dalam dunia pengalaman nyata. Sehingga menjadikan ini lebih bermakna bagi subjek didik dan akan semakin mudah dikuasai ketika mereka dapat memanfaatkannya sebagai alat yang dapat memuaskan kebutuhan dan kepentingan mereka dalam menghadapi realitas. Menurut kaum pragmatis, [seorang anak selalu belajar secara alamiah karena memang ia adalah makhluk yang secara natural selalu ingin tahu tentang sesuatu];

- d) Epistemologi eksistensialisme: Berangkat dari kebebasan sebagai corak bereksistensi, demikian tidak menempatkan individu ke dalam realitas yang abstrak tetapi individu dilihat sebagai satu pribadi yang sungguh hadir dan konkrit. Hanya orang yang berani mengambil keputusan yang dapat bereksistensi dengan mengambil keputusan atas pilihannya sendiri, maka dia akan menentukan kemana arah hidupnya.

Bidang lainnya di dalam ilmu filsafat; seperti filsafat manusia, alam dunia, pengetahuan, kehutanan, moral dan sosial, kemudian disusunlah uraian ontologi. Ontologi adalah ilmu yang mempelajari tentang keadaan alam yang sebenarnya secara universal. Kata Ontologi berasal dari kata *Ontos* yang berarti berada yang ada (Wahyuni et al., 2017). Dalam sisi yang lebih luas serta implikatif pada pendidikan, maka beberapa pandangan yang mendasari segi ontologi, dan tercakup pada:

- a) Idealisme: para idealism [para cendikiawan pada paham ini] memiliki fikiran bahwa [apa yang ada di dunia itu berbeda dengan realitas yang ada]. Menurut Plato Idealisme merupakan suatu faham yang menganggap bahwa realitas terdiri dari jiwa dan fikiran. Para tokoh-tokoh idelisme seperti Plato (477-347), B. Spinoza (1632-1677 M), Liebniz (1685-1753 M), Berkeley (1685-1753), Immanuel Kant(1724-1881 M), J. Fichte (1762-1814 M), F.Schelling (1755-1854 M), dan G. Hegel (1770-1831 M);
- b) Realisme: pokok aliran realisme terkait pada sesuatu yang ada berdasarkan bentuk [apa adanya]. Ontologi di dalam aliran realisme menyangkut tentang hal-hal yang bersifat objektif, terdiri berdasarkan *matter* dan bentuk, yang menyesuaikan hukum alam;
- c) Pragmatisme: prakmatis merupakan metode yang menekankan pada akibat dan kegunaan setiap gagasan sehingga memiliki karakteristik yang berbeda dari lainnya. Oesman dan Alfian (1992: 57). Meskipun paham pragmatis hanya mengedepankan intinya (pokok), paham pragmatis digunakan untuk memecahkan permasalahan yang dapat berguna bagi kehidupan masyarakat seperti paham lainnya. Lebih lanjut, Pandang ini bahwa realitas itu suatu hal yang dapat terjadi dan dapat di lihat maupun di rasakan. Kontribusi dalam pendidikan seperti bidang sains. Contoh lain yaitu, pragmatisme juga beranggapan anak adalah makhluk hidup yang aktif dan terus menerus memperbarui pengalaman-pengalaman. Perkembangan pada anak terjadi apabila berinteraksi dengan yang lain;
- d) Eksistensialisme: Kata eksistensi berasal dari kata [ex, bemakna keluar, dan, sistensi, bawaan dari kata kerja sisto berdiri]. Maka dari itu kata eksistensi diartikan: manusia berdiri dengan jati dirinya sendiri.

Di dalam perspektif aksiologi yang menjadi salah satu dari tiga pilar pemikiran yang dalam dan berakar pada filsafat; serta terkait langsung pada pendidikan, Landasan aksiologis sistem pendidikan nasional penting sebagai dasar untuk menganalisis penerapan teori pendidikan

yang berkaitan dengan tujuan pendidikan, terutama dalam kaitannya dengan nilai-nilai Pancasila. Fungsi dari pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan berpikir rasional dan membentuk akhlak mulia dalam kaitannya dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai-nilai religius, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan. (Soeprapto, 2013).

Filsafat Pendidikan adalah cabang filsafat yang objek sasarannya bidang pendidikan. Landasan aksiologis pendidikan akan menganalisis tentang penerapan teori-teori pendidikan yang terkait dengan tujuan pendidikan, terutama dalam hubungannya dengan nilai-nilai dan norma-norma moral. Filsafat Pendidikan memiliki empat fungsi, yaitu fungsi spekulatif, normatif, kritis, dan teoritis. Fungsi spekulatif menekankan bahwa filsafat Pendidikan berusaha memahami berbagai persoalan pendidikan, merumuskannya dan mencari hubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan. Fungsi-fungsi Filsafat Pendidikan berdasarkan teori-teori sebagai berikut:

- a) Tujuan pendidikan diartikan sebagai rekonstruksi pengalaman yang terus-menerus, yaitu mengadakan penyesuaian dan penyesuaian kembali sesuai dengan tuntutan lingkungan. Lebih mendalam, Pendidikan bukan hanya menyampaikan pengetahuan, melainkan yang lebih penting adalah melatih kemampuan berpikir rasional, kesemuanya ini berlandaskan pada pemikiran progresivisme;
- b) Teori esensialisme didasarkan pada konsep pendidikan yang bersandikan atas nilai-nilai yang tinggi, yaitu yang hakiki kedudukannya dalam kebudayaan. Nilai-nilai yang dijadikan dasar adalah nilai-nilai yang telah teruji oleh waktu;
- c) Teori perenialisme didasarkan pada konsep agar pendidikan kembali kepada jiwa pencerahan yang menguasai abad pertengahan;
- d) Teori rekonstruksianisme didasarkan pada konsep agar anak didik dapat dibangkitkan kemampuannya untuk secara konstruktif menyesuaikan diri dengan tuntutan perubahan dan perkembangan masyarakat modern sebagai akibat pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menurut (Sutono, 2015) landasan filosofis pendidikan Indonesia sangat terkait dengan [UUD 1945] yang tercantum dalam beberapa butir yang sistematis-terukur dan berkesinambungan:

Tabel 6:

Undang-Undang Dasar 1945 adalah Landasan Filosofi Pendidikan Nasional

- | |
|--|
| <p>a) Segala sesuatu berasal dari Tuhan sebagai pencipta. Hakikat hidup bangsa Indonesia adalah berkat rahmat Allah Yang Mahakuasa dan perjuangan yang didorong oleh keinginan luhur untuk mencapai dan mengisi kemerdekaan. Selanjutnya, keinginan luhur, yaitu (a). negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur; (b). melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh bangsa tumpah darah Indonesia; (c). memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan</p> |
|--|

	kehidupan bangsa; (d). ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
b)	Pancasila merupakan mazhab filsafat tersendiri yang dijadikan landasan pendidikan, bagi bangsa Indonesia yang dituangkan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dalam pasal 2, yang menyebutkan bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945
c)	Manusia adalah ciptaan Tuhan, bersifat mono-dualisme dan monopluralisme. Manusia yang dicita-citakan adalah manusia seutuhnya, yaitu manusia yang mencapai keselarasan dan keserasian dalam kehidupan spiritual dan keduniawian, individu dan sosial, fisik dan kejiwaan
d)	Pengetahuan diperoleh melalui pengalaman, pemikiran, dan penghayatan.
e)	Perbuatan manusia diatur oleh nilai-nilai yang bersumber dari Tuhan, kepentingan umum dan hati nurani
f)	Pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.
g)	Kurikulum berisi pendidikan umum, pendidikan akademik, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, dan pendidikan profesional
h)	Mengutamakan Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) dan penghayatan. Berbagai metode dapat dipilih dan dipergunakan dalam rangka mencapai tujuan
i)	Peranan pendidik dan anak didik pada dasarnya berpegang pada prinsip keteladanan ing ngarso sung tulado, ing madya mangun karso, dan tut wuri handayani.

Di dalam kerangka yang lebih praktis; Pancasila yang mendasari Pendidikan Indonesia serta Undang-Undang Dasar, maka itu sangat tercermin pada:

- a) Dasar negara;
- b) Pandangan hidup;
- c) Sebagai lambang dari konstitusi:
 - Adanya kesepakatan bersama dan cita-cita bersama;
 - Landasan bernegara tentang tata negara/penyelenggaraan negara & hukum;
 - Landasan tentang prosedur-prosedur kelembagaan negara serta institusi.
- d) Sebagai jati diri dan visi yang melandasi pendidikan secara nasional;
- e) Menumbuhkan pandangan hidup menjadi cita-cita;
- f) Meningkatkan daya nalar di dalam kerangka pendidikan yang filosofis;
- g) filsafat pendidikan adalah pelatihan keterampilan dasar fundamental, baik dalam kaitannya dengan yang intelektual atau pikiran atau perasaan atau kekuatan emosional, sifat manusia yang humanis;
- h) Merupakan jawaban dalam pendidikan;
- i) Mengembangkan potensi setiap individu yang bertumbuh dan berkembang menjadi sifat hakiki dengan ciri-ciri kemanusiaannya. Sehingga

dapat ditegaskan bahwa proses pendidikan merupakan rangkaian usaha membimbing, mengarahkan potensi hidup manusia yang berupa kemampuan dasar dan kehidupan pribadinya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial serta dalam hubungannya dengan alam sekitarnya agar menjadi pribadi yang bertanggungjawab dan sebagai makhluk sosial.

Secara normatif, kebijakan pemerintah Indonesia dalam upaya perbaikan kualitas pendidikan tercermin dalam undang-undang [Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat 1] yang berbunyi “Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan [minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN] pada sektor pendidikan dan [minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD]. Dengan mengalokasikan anggaran pendidikan yang tinggi diharapkan dapat menciptakan pendidikan yang baik sehingga mampu berkompetisi secara global dengan negara-negara di dunia. (Yaumi, 2017).

Di lain sisi adanya kendala dalam pendidikan dan atau sistem pendidikan nasional. Pertama, kebijakan pendidikan yang cenderung diskriminatif dapat dicermati dari adanya kebijakan pemerintah yang berusaha untuk menjadikan sekolah menengah kejuruan [SMK] berbanding 70:30 dengan sekolah menengah umum [SMU/SMA/Madrasah] lainnya. Siswa [SBI/sekolah berstandar internasional juga memiliki pengalaman belajar yang sama dengan *International Baccalaureate*/IB atau Cambridge]. Namun, dilihat dari berbagai aspek, perhatian pemerintah terhadap sekolah yang berstandar internasional telah menimbulkan gap yang begitu besar dengan sekolah-sekolah yang berstandar lokal, regional, dan bahkan yang berstandar nasional.

Kedua, pendidikan berorientasi menciptakan tenaga kerja murah, yang oleh sebagian pandangan menganggap sebagai kebijakan yang salah arah, karena hanya sebagai penyedia supply tenaga kerja (pekerja) murah, bukan menjadi lokomotif lokomotif penggerak ekonomi melalui wirausaha (entrepreneurship) yang mandiri. Berdasarkan laporan *Global Entrepreneurship Monitor* menunjukkan bahwa Singapura telah menciptakan tenaga handal interpreneur sebesar [2,1 persen pada tahun 2001 dan menjadi 7,2 persen tahun 2005].

Setiap tahun Indonesia memproduksi sekitar [300.000 sarjana dari 2.900] perguruan tinggi. Dari sekian banyak sarjana terungkap bahwa jumlah pengangguran terdidik melonjak tajam hampir dua kali lipat dalam empat tahun terakhir. Angka ini bertambah besar jika digabung lagi dengan pengangguran lulusan diploma yang mencapai [486.400 orang] Meningkatnya jumlah pengangguran intelektual di Indonesia diakibatkan para sarjana yang orientasinya mencari kerja, tapi bukan menciptakan pekerjaan. Permasalahan lain yang hingga kini belum dapat diatasi secara serius adalah ketidakjelasan arah kebijakan pendidikan, di satu sisi menganut sistem desentralisasi dalam pengertian menyerahkan sebagian kekuasaan dari pusat kepada daerah, tetapi di sisi lain pengendalian kebijakan masih tetap dilakukan secara sentralistik dari pusat pemerintahan.

Berdasarkan model reformasi pendidikan sebagaimana dilakukan oleh negaranegara besar tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa terdapat dua aspek yang

menstimulasi lahirnya reformasi pendidikan, yakni aspek internal seperti kualitas pendidikan yang diselenggarakan dan aspek eksternal, yakni tuntutan perubahan.

Tabel 7:
Faktor Penghambat

a) Rendahnya mutu pendidikan dan tingginya angka putus sekolah
b) Rendahnya kesadaran dan penguasaan teknologi para pelaku pendidikan sehingga belum dimanfaatkannya secara maksimal ilmu dan teknologi bagi kemajuan pendidikan
c) Belum terciptanya budaya belajar di kalangan masyarakat
d) Profesionalisme dan tingkat kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan lainnya yang masih belum sesuai dengan tantangan peningkatan mutu.
e) Menurunnya status kesehatan dan gizi sebagian peserta didik sebagai dampak krisis ekonomi yang mempengaruhi kesiapan mereka untuk belajar
f) Terjadinya gejala umum menurunnya moral, budi pekerti, dan rasa toleransi di kalangan peserta didik dan generasi muda

BAB III

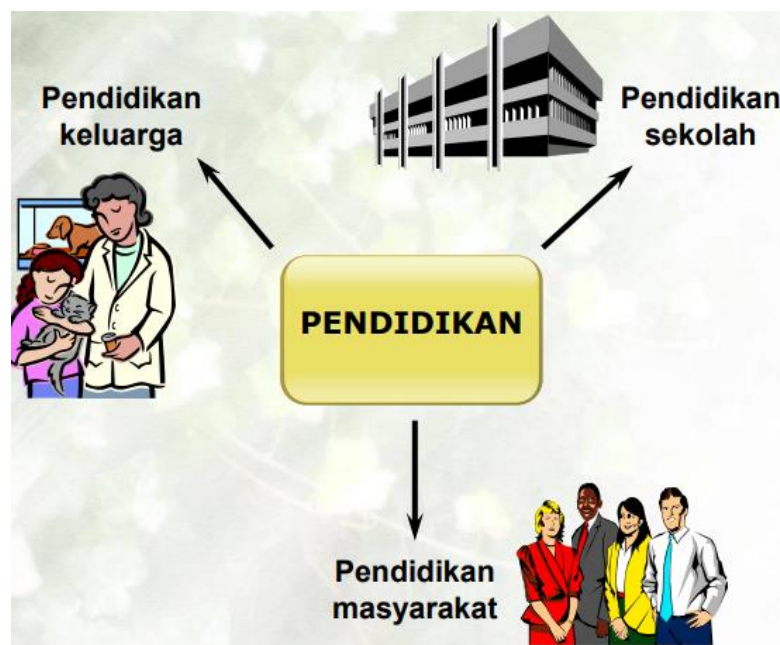
PENYELENGGARAAN SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

Dijabarkan oleh (Gunawan, 2015) bahwa prinsip dari sistem penyelenggaraan pendidikan Indonesia terlihat sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna. Sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik dalam proses pembelajaran. Dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. Dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Maka pada kajian pendidikan tercakup pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Jalur terbagi menjadi: formal-informal-dan non formal, serta ditambah dengan kebijakan studi jarak jauh/system tatap-muka jarak jauh.

3.1. Jalur Pendidikan

Pada jalur Formal (Gunawan, 2015b) mengaskan bahwa jalur ini ercakup pada Pendidikan dasar-mengengah-dan atas [dikdasmenas] dan perguruan tinggi. Sedangkan pada jalur non-formal tentunya terlaksana di luar pendidikan formal, tetapi tersktruktur. Untuk informal dilaksanakan pada lingkungan keluarga dan masyarkat sekitar.



Figur 7:
Jalur Pendidikan Formal-Non Formal-Informal

3.2. Jenjang Pendidikan

Sesuai standar nasional sampai sekarang ini, pendidikan diurutkan pastinya ke dalam dasar-menengah-atas-serta perguruan tinggi. Jalur-jalur tersebut, merupakan representative dari pendidikan formal (Gunawan, 2015c). Ditekankan lebih lanjut oleh (Kuntoro, 2006) “pendidikan non-formal diselenggarakan untuk warga yang membutuhkan pendidikan alternative; sistem ini membantu-melengkapi-serta mendukung seluruh pendidikan di dalam kehidupan manusia”. Hal tersebut, diimplementasikan di dalam bentuk pendidikan [paket a-b-c], yang terlandasi oleh [UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 26 ayat 1]. Pada paket A-untuk setingkat sekolah dasar; B untuk setingkat menengah pertama; dan C untuk setingkat menengah atas.

Pada pendidikan informal menurut (Sudiapermana, 2009), di lain sisi, “seringkali istilah formal dipahami sebagai sesuatu yang legal dan mendapat pengakuan dari negara, bahkan sering diartikan sebagai sesuatu yang resmi. Akibat pola pikir seperti ini, sesuatu yang tidak formal (sering disebut nonformal atau informal) dipahami sebagai suatu yang tidak resmi, kurang penting, dianggap tidak perlu mendapat pengakuan dan bahkan dianggap tidak berarti. Lebih celaka lagi, sesuatu yang nonformal atau informal sering dianggap sebagai sebuah penyimpangan atau sekurang-kurangnya dianggap sebagai suatu penentangan terhadap yang formal”.

Menurut [UU NO 20/2003], “sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pendidikan dilakukan melalui tiga jalur, yaitu: pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan pendidikan informal. Pendidikan formal dilakukan di sekolah, pendidikan non-formal dilaksanakan di masyarakat, dan pendidikan informal utamanya dilaksanakan di keluarga. Oleh karena itu, pendidikan non-formal dan informal sering diasosiasikan sebagai pendidikan di luar sistem persekolahan, atau secara singkat disebut pendidikan luar sekolah” (Sudiapermana, 2009b).

Selanjutnya, pendidikan informal jika dikerucutkan seperti, pendidikan yang mungkin terjadi dalam keluarga, yaitu: 1) pendidikan iman, 2) pendidikan moral, 3) pendidikan fisik, 4) pendidikan intelektual, 5) pendidikan psikis, 6) pendidikan sosial, dan 7) pendidikan seksual. Sejalan dengan itu, Abdul Halim mengemukakan bahwa mendidik anak pada hakikatnya merupakan serangkaian usaha nyata orang tua dalam rangka: 1) menyelamatkan fitrah Islamiah anak, 2) mengembangkan potensi pikir anak, 3) mengembangkan potensi rasa anak, 4) mengembangkan potensi karsa anak 5) me-ngembangkan potensi kerja anak, dan 6) mengembangkan potensi sehat anak. Adapun mengenai metode-metode dalam pendidikan keluarga yang banyak berpengaruh terhadap anak, menurut Abdullah Nashih Ulwan , terdiri dari: 1) pendidikan dengan keteladanan, 2) pendidikan dengan adat kebiasaan, 3) pendidikan dengan nasihat, 4) pendidikan

dengan pengawasan, dan 5) pendidikan dengan hukuman (Sudiapermana, 2009c).

Pendidikan apapun bentuknya, pastinya mempunyai tantangan, maka pada informal, tantangan tersebut secara umum dapat dibagi menjadi: “perspektif sistem dalam memandang dunia dan masalahnya; perspektif ekologis tentang hubungan antara aktifitas sosial manusia dan kapasitas planet bumi dalam mendorong kehidupan. Dalam sudut pandang sistem, masalah yang akan dihadapi adalah saling kebergantungan ekonomi, politik, ideologi dan budaya. Bahkan sistem dunia akan menjadi sangat kompleks, tidak teratur dan tidak stabil. Sedangkan dalam sudut pandang ekologis, persoalannya adalah sejauhmana lingkungan fisik dan sumberdayanya dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia yang populasinya makin tinggi dengan tetap menjamin berlangsungnya pembangunan berkelanjutan” (Sudiapermana, 2009d).

		• Competency driven
Delivery	<ul style="list-style-type: none"> • Limited learning options and modalities • Formal institutions • Uniform centralized control • Supply driven 	<ul style="list-style-type: none"> • Multitude of learning options, settings, and modalities • New pedagogical approaches • Technology-supported delivery • Pluralistic, flexible decentralized system • Learner driven
<i>Dimension</i>	<i>Traditional model</i>	<i>Lifelong learning model</i>
Scope	• Formal schooling from primary to higher education	• Learning throughout the lifecycle—in schools, on the job, after retirement
Content	<ul style="list-style-type: none"> • Acquisition and repetition of knowledge • Curriculum driven 	<ul style="list-style-type: none"> • Creation, acquisition, and application of knowledge • Diverse sources of knowledge • Empowerment of learners

Figur 8:
Scope, Content, and Delivery of Education and Training in Traditional and Lifelong Learning Models

1. pergeseran paradigma dari belajar terminal ke belajar sepanjang hayat.
2. pergeseran paradigma dari belajar berfokus ke penguasaan pengetahuan ke belajar holistik
3. pergeseran paradigma dari citra hubungan guru-siswa yang bersifat konfrontatif ke citra hubungan guru-siswa yang bersifat kemitraan.
4. pergeseran paradigma dari pengajaran yang menakutkan kepada penguasaan pengetahuan skolastik atau akademik ke penekanan keseimbangan fokus pendidikan nilai.
5. pergeseran paradigma dari kampanye melawan buta aksara ke kampanye memperkuat literasi (keterbacaan) teknologi, budaya, dan komputer.
6. pergeseran paradigma dari penampilan soliter (terisolasi) ke penampilan dalam kerja tim (teamwork).
7. pergeseran paradigma dari konsentrasi eksklusif pada kompetisi ke orientasi kooperatif (kerjasama).

Figur 9:
Gagasan-Gagasan Pergeseran Paradigma Pendidikan dalam Kaitannya terhadap Pendidikan

Betumpu pada kerangka pendidikan informal di atas, maka agenda pendidikan informal dapat dicapai salah satunya dengan melakukan pendekatan “[PLAR/Prior Learning Assesment and Recognition] adalah sebuah proses yang membantu orang dewasa untuk menunjukkan dan memperoleh pengakuan belajar bahwa mereka memperoleh pendidikan di luar pengaturan atau system yang ada. Fokus [PLAR] pada apa yang orang dewasa ketahui dan dapat dilakukan. [PLAR] mengakui pengetahuan dan keterampilan yang orang telah peroleh dari pengalaman mereka” (Sudiapermana, 2009e).

Lebih mendalam diterangkan bahwa (Kuntoro, 2006b) “individu selalu hidup dalam konteks nilai sosial budaya yang diperlukan bagi pengaturan ketertiban kehidupan dan aktivitas kerja yang dapat menyenangkan dan membahagiakan. Pendidikan nonformal yang menonjolkan pada kegiatan yang berorientasi pada kepelatihan kerja dalam rangka pencapaian peningkatan pendapatan kurang dapat memberi peluang bagi pelaksanaan pendidikan nonformal yang mendukung pendidikan sepanjang hayat dan terbentuknya masyarakat belajar. Makna pendidikan nonformal mencakup keduanya bagi individu dan kelompok sosial di mana individu berada di suatu masyarakat”.

Ditegaskan oleh (AU Athabasca, 2013) pendekatan [PLAR] “dengan menggunakan proses [PLAR], kita dapat berkembang dengan efisien; dengan kata lain yaitu menghemat waktu belajar. Serta mendapatkan serta mendapatkan faedah pada keberlangsungan kehidupan kita. Hal tersebut sejalan dengan alasan mempelajari sesuatu yang sudah Anda ketahui; niali apa yang telah dipelajari. Serta tentunya menghemat uang. Maka sejalan dengan pelaksanaan pendekatan itu, maka dalam segi finansial lebih menghemat biaya.

Selanjutnya, pendekatan tersebut meningkatkan wawasan tentang hidup. Maka itu, “[PLAR] adalah alat pembelajaran yang ampuh. Di dalam mengembangkan portofolio yang membantu pribadi dalam merefleksi, dan memahami pengalaman. Pendektatan tersebut dilembangkan lewat portofolio yang mampu memperjelas tujuan dalam menjelaskan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan. Lewat alat portofolio, kita dapat mensintesa-merekonstruksi-mengidentifikasi tujuan kegiatan dan kebutuhan kita. Maka dapat terlihat lebih jelas dengan dilaksanakan dan melibatkan diri kita di dalam pendekatan ini, kita dapat mengembangkan diri menjadi pribadi yang berkualitas serta produktif bagi negara” (AU Athabasca, 2013b).

Ide di dalam mendukung esensi pembelajaran yang terkait pada “[PLAR] membangun pemahaman tentang pentingnya suatu pembelajaran di dalam konstruksi pendekatan tersebut, maka itu landasan pokoknya yaitu [PLAR] adalah proses yang melibatkan identifikasi, dokumentasi, penilaian dan penguatan pembelajaran yang telah diperoleh melalui studi formal dan informal. Selanjutnya, proses pengenalan dan memberikan penguatan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang telah diperoleh dari

pengalaman; yang meliputi jalur alternatif yaitu pengalaman kerja, pendidikan atau pelatihan, belajar mandiri, kegiatan sukarela, dan hobi” (Adult Learning and Literacy, 2012)

- On the job
- In volunteer activities
- Through a hobby or interest
- In military service
- Through travel
- On training courses
- Through independent study
- Through family and life experiences

Figur 10:
Contoh Kegiatan Pembelajaran

Kesimpulannya, lewat keterlibatan dalam proses implementasi dari [PLAR] “maka proses tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan membangaun pengetahuan siap dan terkait dengan tujuan pengembangan diri. Pendekatan ini sangat juga esensial dalam mengembangkan serta meningkatkan ketrampilan individu. Sehingga dapat mempertahankan kredensial dan pengalaman yang bernilai di tengah masyarakat” (Adult Learning and Literacy, 2012b).

Pada sisi perguruan tinggi (Gunawan, 2015c) mensintesa pehamannya bahwa “jenjang ini dapat berbentuk: akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas. Akademi menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu cabang atau sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni tertentu; politeknik menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus; sekolah tinggi menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau vokasi dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi; institut menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi dalam sekelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi; universitas menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi dalam sejumlah ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi”.



Figur 11:
Kerangka Jenjang Pendidikan

Sejalan dengan kerangka jenjang pendidikan nasional di atas, yang terlihat pada gambar [11]; maka dapat diperkuat pemahaman kita bahawa “mulai dari SMP, para lulusan dapat melanjutkan ke jenjang berikutnya yang mempersiapkan diri untuk terjun ke dalam masyarakat, atau ke jenjang untuk mempersiapkan diri ke jenjang berikutnya, yaitu dari [SMP ke SMK atau ke SMA, dari SMA ke S1 atau ke pendidikan vokasi, , dari S1 ke pendidikan profesional , atau ke S2, atau ke pendidikan profesional setingkat S2]. Dari pendidikan profesi seorang dapat melanjutkan ke [jenjang S2 untuk diteruskan ke S3], atau melanjutkan ke pendidikan spesialis. Namun, sering dikaburkan falsafah pendidikan akademis dan pendidikan profesional, terutama pada pendidikan vokasi (BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN, 2010).

3.3. Jenis Pendidikan

Tabel 8:
Jenis Pendidikan

a)	Pendidikan Umum: Pendidikan dasar dan menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
b)	Pendidikan Kejuruan: Pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu.
c)	Pendidikan Akademik: Pendidikan tinggi program sarjana dan pascasarjana yang diarahkan terutama kepada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu.

d) Pendidikan Profesi: Pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.
e) Pendidikan Vokasi: Pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan program sarjana.
f) Pendidikan Keagamaan: Pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
g) Pendidikan Khusus: Penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah.

Berikut ini merupakan kumpulan video youtube mengenai isu esensial terkait dengan pendidikan, termasuk satuan pendidikan yang dapat diterjemahkan menjadi kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan:

Tabel 9:

Daftar Situs Youtube untuk Isu-Isu Esensial Terkait dengan Pendidikan

https://www.youtube.com/watch?v=YX3AvttttWY
https://www.youtube.com/watch?v=YheZJrY3ZH4
https://www.youtube.com/watch?v=4r9otCeTb_c
https://youtu.be/o8uxBrWqqk0
https://youtu.be/DZkc6Lq6yrQ
https://youtu.be/MvI0bN59DMY
https://youtu.be/8E8XfWj3_h4
https://youtu.be/iZU8dbS1-B0
https://youtu.be/JMXjKG1plYw
https://youtu.be/tZH9_W3Cacs
https://youtu.be/JzzeFt-pi-8
https://youtu.be/uZQErOfhqwc
https://youtu.be/bOrhDvSLgHY
https://youtu.be/HpMZnAI2XIM
https://youtu.be/0uRzeDSrikQ
https://youtu.be/otuW7HLWHpY
https://youtu.be/OXA7tm40LSs
https://youtu.be/z-6raEXrK2s
https://youtu.be/YkylcEQWGIY
https://youtu.be/0BfKjIHhk1Y
https://youtu.be/BkyYo6FK5l4
https://youtu.be/bBo9OfxJ-94
https://youtu.be/XotLv83P4LA
https://youtu.be/AEcKvd9fwNU
https://youtu.be/TPxXMmCXFHs

https://youtu.be/O7PFKRH3dml
https://youtu.be/HBkBZL6cx1s
https://youtu.be/LRtuqUHBYOQ
https://youtu.be/JzzeFt-pi-8
https://youtu.be/-wyNCMy1oqY
https://youtu.be/wJPfjfbRbGI
https://youtu.be/dYZnSiAed6I

3.2. Pendidikan Umum dan Kejuruan

Konstruksi pendidikan menurut (Darmadi, 2018) secara garis besar terbagi menjadi tujuh klasifikasi. Maka itu, klasifikasi tersebut dapat dilihat seperti:

- i. Pendidikan umum: pendidikan dasar dan menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan yang diperlukan oleh peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Pengertian Pendidikan Umum meliputi; pendidikan yang berkenaan dengan perkembangan keseluruhan kepribadian seseorang dalam kaitannya dengan masyarakat dan lingkungan hidupnya. 008-E/U/1975 disebutkan bahwa Pendidikan Umum ialah pendidikan yang bersifat umum, yang wajib diikuti oleh semua siswa dan mencakup program Pendidikan Moral Pancasila yang berfungsi untuk pembinaan warga negara yang baik;
- ii. Pendidikan kejuruan: pendidikan menengah yang bertujuan mempersiapkan peserta didik untuk bekerja dalam bidang tertentu. Menurut Kurikulum 2013 Pendidikan Kejuruan adalah pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja dalam bidangnya masing-masing. Tujuan pendidikan kejuruan adalah untuk menyiapkan peserta didik untuk bekerja dan mampu bersaing dalam proses pekerjaannya.
 Tujuan dari pendidikan kejuruan dibagi lagi menjadi umum dan khusus yang meliputi; pada cakupan umum pendidikan kejuruan bertujuan untuk membangun kemampuan peserta didik agar siap dalam menerapkan keilmuannya selaras dengan pemeliharaan budaya, serta lingkungan sekitar. Sedangkan pada tujuan khusus, bertujuan untuk menyiapkan dan membangun sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, kemampuan vokasi yang disinergikan lewat produktivitas dalam menghasilkan program penelitian serta produk yang inovatif. Sehingga kemampuan yang terbangun menjadi sumber daya manusia yang produktif dalam pembaharuan informasi keilmuan dan mampu mandiri sebagai wirausaha.
- iii. Pendidikan akademik: pendidikan Tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan dan pengembangan disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni tertentu (program sarjana dan pascasarjana). Pendidikan Akademik mencakup program pendidikan sarjana, magister atau master dan doktor. Pendidikan akademik memusatkan kajiannya pada bidang

ilmu, teori atau konsep sedang pendidikan profesi pada penguasaan pengetahuan dan kecakapan atau kompetensi untuk praktek;

- iv. Pendidikan profesi: profesi adalah suatu pekerjaan yang dalam melaksanakan tugasnya memerlukan/menuntut keahlian, menggunakan teknik-teknik ilmiah, serta dedikasi yang tinggi.[14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen] disebutkan:".profesional dirumuskan sebagai pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kecakapan, atau kemahiran yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profess". Pendidikan profesi merupakan suatu program pendidikan formal yang disediakan atau diikuti untuk menjadi seorang profesional dalam suatu Pendidikan dinyatakan bahwa pendidikan profesi, khususnya pendidikan guru dan dosen adalah pendidikan di atas program [D-4 atau S1] .dan ditujukan untuk mengembangkan kompetensi sebagai pendidik. Demikian juga program [S2 dan S3] yang merupakan pendidikan akademik, walaupun program studi tertentu muatan profesionalnya cukup kuat.

Sedangkan bagi dunia pedagogik, pendidikan Profesi Guru merupakan suatu wahana bagi guru untuk mengaplikasikan ilmu untuk mendapatkan profesionalisme guru. Pendidikan Profesi Guru yang dilakukan guru merupakan salah satu wadah agar guru mendapatkan pengalaman profesi yang dapat diandalkan. Pendidikan Profesi Guru tidak hanya kegiatan mengajar yang harus ditempuh oleh guru, tetapi juga menyangkut kemampuan berpartisipasi, membangun, atau mengembangkan potensi pendidikan yang selama ini diampu.

- v. Pendidikan vokasi: kualifikasi pendidikan ini yaitu pendidikan Tinggi yang diarahkan untuk mempersiapkan peserta didik agar memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan program sarjana. Pendidikan Vokasi adalah sistem pendidikan tinggi yang diarahkan pada penguasaan keahlian terapan tertentu. Lulusan pendidikan vokasi mendapatkan gelar vokasi, misalnya [DI, DII, DIII, DIV, A.Ma/Ahli Madya), A.Md/Ahli Madya].

Lebih lanjut Bahkan banyak juga perusahaan yang lebih menyukai para lulusan pendidikan kejuruan yang telah menguasai keahlian praktikal, karena dianggap lebih siap kerja. Pendidikan kejuruan adalah pendidikan yang menekankan pada keahlian praktikal yang dibutuhkan untuk langsung terjun ke dunia kerja. Misalnya: Seni Kuliner Prancis: Patisserie, Multimedia: Character Design, dan lain sebagainya yang benar-benar membutuhkan keahlian praktikal.

- vi. Pendidikan agama: program ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agama lainnya;

- vii. Pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus: Penyelenggaraan pendidikan khusus dapat dilakukan melalui satuan pendidikan khusus, satuan pendidikan umum, satuan pendidikan kejuruan, dan/atau satuan pendidikan keagamaan; untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa dapat diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Penyelenggaraan satuan pendidikan khusus dapat dilaksanakan secara terintegrasi antar jenjang pendidikan dan/atau antar jenis kelainan.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA DIDIK

4.1. Peserta Didik

Berdasarkan tinjauan dari (Tim Yuridis.Id, 2018) di dalam perspektif hukum, tugas dan kewajiban peserta didik, dan diatur dalam undang-undang yang terlampir pada Ketentuan mengenai hak dan kewajiban peserta didik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Serta turunan pasal pada cakupan yang berbunyi “Warga negara asing dapat menjadi peserta didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Sedangkan pada cakupan warga negara Indonesia yang menjadi peserta didik dapat dilihat dari beberapa faktor seperti;

- i. Hak meliputi:
 - ❖ Pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
 - ❖ Pelayanan pendidikan;
 - ❖ Beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu;
 - ❖ Biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu;
 - ❖ Pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara;
 - ❖ Menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.
- ii. Kewajiban meliputi:
 - ❖ Menjaga lewat harmonisasi tidak pada isu norma-norma pendidikan;
 - ❖ Menanggung biaya pelaksanaan pendidikan terkecuali pada individu yang terbentur masalah ekonomi.

4.2. Tenaga Kependidikan

Hak dan tanggungjawab dari tenaga kependidikan dapat meliputi secara umum, yaitu, pada cakupan kewajiban, tenaga pendidik atau guru adalah tenaga profesional yang dapat menjadikan murid-muridnya mampu merencanakan, menganalisis, dan menyimpulkan masalah yang dihadapi. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang berusaha mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Tugas tenaga kependidikan itu adalah melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan (Amiruddin, 2020).

4.3. Sumber Daya Kependidikan

Di dalam pembangunan pendidikan, pastinya didukung oleh berbagai faktor, yang salah satunya yaitu sumber daya manusia. Tetapi, di lain sisi, faktualnya ada hambatan yang secara teknis maupun teoritis. Terlepas dari kendala tersebut, Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 menegaskan bahwa [sistem pendidikan nasional menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. Berbagai pengamat dan studi menunjukkan penyelenggaraan pendidikan nasional belum juga merata baik kesempatan maupun mutunya, akibatnya pendidikan nasional yang secara konsitusi berfungsi mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kebudayaan nasional belum juga nampak keberhasilannya]. Bertolak dari landasan hukum tersebut, maka, berbagai hambatan yang terjadi di lapangan seperti; (a) perekonomian dan perkembangan teknologi; (b) ketersediaan dan kualitas tenaga kerja; (c) kependudukan dengan masalah-masalahnya; (d) restrukturisasi organisasi (Widiansyah, 2018).

Table 10:
Daftar Situs Internet Terkait Isu Hak dan Kewajiban

Kumpulan Situs Internet Terkait Isu Hak dan Kewajiban
https://youtu.be/0B2luP2OI4
https://youtu.be/qIN9UhdWgJA
https://youtu.be/LIDvGo3Qn-o
https://youtu.be/q846fGB7Bok
https://youtu.be/Wg7xWibweYs
https://youtu.be/BOtjJGCwq7c
https://youtu.be/Uxjnh5nUxNk

4.4. Kurikulum

Perubahan kurikulum di Indonesia telah mengalami banyak perubahan, perubahan tersebut dari tahun: 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, dan 2004, 2006 serta yang terbaru adalah kurikulum 2013 (Alhamuddin, 2014).

Tabel 11:
Daftar Alamat Situs Daring Perkembangan Kurikulum dan Cakupannya terhadap Pendidikan Seni Musik

https://youtu.be/LrVfEHZ3uIE
https://youtu.be/ApSlbjnWxu8
https://youtu.be/LyS7MqsmqSo
https://youtu.be/Ya9C8D6i97k
https://youtu.be/sucf8YfN6a0
https://youtu.be/q_EleykFIdQ
https://youtu.be/kWa6oeK_gX8
https://youtu.be/K7QkiltK3sE
https://youtu.be/LziMix4JCvs

https://youtu.be/y24WesMMLgY
https://youtu.be/Ndx-o7WBViA
https://youtu.be/nZ5WsGalQ6o
https://youtu.be/Xb5n5cQKDb0
https://youtu.be/XNoFW_YHJM
https://youtu.be/EmD0smoFDa0
https://youtu.be/5Vz5v66A6DM
https://youtu.be/R1JndL0mzjs
https://youtu.be/NDrtxYzq6e0
https://youtu.be/Y5Xp57_CFS8
https://youtu.be/sx-4myAq6XM
https://youtu.be/OkFe49nUNIA
https://youtu.be/Y8KA4oxSZ8g
https://youtu.be/V7TN8ZyAQKE
https://youtu.be/jqgdO1nZo84

BAB V

ASAS-ASAS POKOK PENDIDIKAN INDONESIA

Asas pokok pendidikan Indonesia dilandasi dengan berbagai perspektif pendahulu yang saling bertalian erat. Pemaparan dari setiap asa tersebut dapat terlihat dalam:

- I. Tutuwuri Handayani: Tut Wuri Handayani merupakan rangkaian kata yang berasal dari kata tut wuri yang artinya mengikuti dari belakang dan kata handayani berarti memberikan motivasi atau mendorong semangat. Dengan begitu jika disimpulkan, maka tut wuri handayani memiliki makna seorang guru yang diharapkan mampu memberikan suatu dorongan moral dan semangat pada peserta didik saat guru tersebut berada di belakang. Setelah mengetahui semboyan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, kita juga harus tahu bagaimana sejarah dari Tut Wuri Handayani. Sejarahnya sendiri berawal dari perjuangan bapak pendidikan Indonesia yaitu Ki Hajar Dewantara bersama dengan Taman Siswa di jaman dahulu kala¹;
- II. Belajar sepanjang hayat: pendidikan itu dapat ditinjau dari beberapa segi yang mendeskripsikan tidak ada batas dalam belajar seperti²; psikologi, ideology, ekonomi, politis, teknologi, dan pedagogik;
- III. Kemandirian dalam belajar: aktivitas belajar yang berlangsungnya lebih didorong oleh kemauan sendiri, pilihan sendiri, dan tanggung jawab sendiri dari pembelajar. Kemandirian disini, berarti lebih ditekankan pada individu yang belajar dan kewajibannya dalam belajar dilakukan secara sendiri dan sepenuhnya dikontrol sendiri. Lebih lanjut mandiri dalam belajar yaitu metode belajar dengan kecepatan sendiri, tanggung jawab sendiri, dan belajar yang berhasil³;
- IV. Sedangkan asas pendidikan tinggi: meliputi banyak hal seperti kebenaran ilmiah; penalaran; kejujuran; keadilan; manfaat; kebajikan; tanggung jawab; kebhinnekaan; dan keterjangkauan⁴. Lebih lanjut pendidikan tinggi mengambil peran yang sangat luas. Dan dapat terlihat di dalam Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada

¹ <https://blog.elevenia.co.id/inilah-pengertian-sejarah-dan-makna-tut-wuri-handayani/#>

² http://fip.um.ac.id/wp-content/uploads/2015/12/8.2_Pendidikan-Sepanjang-Hayat.pdf

³ <http://eprints.uny.ac.id/18539/3/BAB%20II.pdf>

⁴ <https://www.dkampus.com/pendidikan-tinggi/>

masyarakat. Sedangkan fungsi dari perguruan tinggi meliputi: pengembangan kemampun serta pembentukan watak, dan pengembangan IPTEK. Pada tujuan perguruan tinggi, menasar pada peserta didik, masyarakat, dan iptek. Hal-hal tersebut dicapai dengan proses pengembangan yang merata terhadap sasaran-sasaran di atas.

Di dalam implementasi asas-asas pendidikan, hal dapat dilaksanakan terlihat pada beberapa studi kasus di bawah ini⁵:

- I. Keadaan yang ditemui;
- II. Permasalahan yang dihadapi;
 - a) Peningkatan mutu pendidikan;
 - b) Peningkatan relevansi pendidikan;
 - c) Masalah komunikasi oleh guru/pendidik;
 - d) Peranan pendidik;
 - e) Tujuan belajar
- III. Pengembangan penerapan asa pendidikan:
 - a) Peningkatan mutu;
 - b) Peningkatan relevansi pendidikan;
 - c) Menggeser peranan pendidik menjadi fasilitator, informator, motivator, dan organisator;
- IV. Peningkatan tujuan belajar menjadi *learning to know*, *learning to do*, *learning to life together*, dan *learning to be*.

⁵ <https://afidburhanuddin.wordpress.com/2013/11/08/asas-asas-pendidikan/>

Daftar Pustaka

- Alhamuddin, A. (2014, October 1). Sejarah Kurikulum Di Indonesia (Studi Analisis Kebijakan Pengembangan Kurikulum). Neliti - Indonesia's Research Repository. <https://www.neliti.com/publications/226468/sejarah-kurikulum-di-indonesia-studi-analisis-kebijakan-pengembangan-kurikulum>
- Amiruddin, B. (2020). PERSEPSI TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN TERHADAP PROGRAM BELAJAR DARI RUMAH. *Jurnal As-Salam*, 4(1), 28–36. *As-Salam Journal*. <https://doi.org/10.37249/as-salam.v4i1.146>
- Adult Learning and Literacy. (2012). Recognition of Prior Learning (RPL) Manual. In *Prior Learning Assessment Manual* (p. 22). Adult Learning and Literacy. <https://www.edu.gov.mb.ca/all/plar/pdf/manual.pdf>
- AU Athabasca. (2013). A Handbook for Preparing Portfolios. In *PLAR Handbook* (p. 61). Athabasca University. <http://priorlearning.athabascau.ca/documents/PLAR-handbook.pdf>
- BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN. (2010). PARADIGMA PENDIDIKAN NASIONAL ABAD XXI BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN. In *BSNP-Paradigma Abad 21-Editing tgl 1 NOVEMBER* (p. 59). Badan Standar Nasional Pendidikan. <https://akhmadsudrajat.files.wordpress.com/2013/06/paradigma-pendidikan-nasional-abad-xxi.pdf>
- Darmadi, H. (2018 17). Jenis-Jenis Pendidikan. *Hamid Darmadi*. <http://hamiddarmadi.blogspot.com/2018/07/jenis-jenis-pendidikan.html>
- Devinta, M. S., Azizah, N., & Anggraini, R. H. (2017). EPISTEMOLOGI PENDIDIKAN MENURUT BERAGAM FILSAFAT DUNIA: IDEALISME, REALISME, PRAGMATISME, EKSISTENSIALISME. Repository - Repository Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. https://eprints.umsida.ac.id/cgi/search/simple?q=Maully+Syifa+devinta&_action_search=Search&_action_search=Search&_order=bytitle&basic_srctype=ALL&_satisfyall=ALL
- Gunawan, I. (2015). SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL DI INDONESIA. In *Pokok Bahasan VIII Sistem Pendidikan Nasional* (p. 21). Universitas Negeri Malang. http://fip.um.ac.id/wp-content/uploads/2015/12/13_Sisdiknas.pdf
- Kuntoro, S. A. (2006, Desember 26). *PENDIDIKAN NONFORMAL (PNF) BAGI PENGEMBANGAN SOSIAL*. *Journal.Unj.Ac.Id; Jurnal Ilmiah VISI PTK-PNF*. <http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jiv/search/search>
- Prastowo, A. (2020, September 24). TRANSFORMASI KURIKULUM PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DI INDONESIA. Retrieved September 24, 2020, from <https://doi.org/10.19109/jip.v4i2.2567>
- Rosyid, D. M., & Ekowanti, M. L. (2018). Pendidikan Bagi Generasi Emas Indonesia Abad 21: Sebuah Agenda Perubahan Paradigmatik. *Proceedings of the ICECRS*, 1(3), 113–118. <https://doi.org/10.21070/picecrs.v1i3.1386>
- Sudiapermana, E. (2009). PENDIDIKAN INFORMAL. *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 4(2), 7. <https://ejournal.upi.edu/index.php/pls/article/view/1220>
- Soeprapto, S. (2013). Landasan AKSIOLOGIS sistem PENDIDIKAN NASIONAL Indonesia DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT PENDIDIKAN | Soeprapto | Jurnal Cakrawala Pendidikan. *Cakrawala Pendidikan. Jurnal Ilmiah Pendidikan*. 10.21831/cp.v0i2.1485. <https://journal.uny.ac.id/index.php/cp/article/view/1485>

- Sutono, A. (2015, January). MENEGUHKAN PANCASILA SEBAGAI FILSAFAT PENDIDIKAN NASIONAL. <https://core.ac.uk/reader/234022380>
- Tim Yuridis.Id. (2018, 3). Ketentuan Mengenai Hak Dan Kewajiban Peserta Didik. Yuridis.Id. <https://yuridis.id/ketentuan-mengenai-hak-dan-kewajiban-peserta-didik/>
- Yaumi, M. (2017). Lokasi: Reformasi Sistem Pendidikan Di Indonesia: Suatu Refleksi Kritis Menuju Perbaikan Kualitas. Indonesia Onesearch. <https://onesearch.id/Record/IOS3661.394#details>
- Yusuf, M. M. (2019). Transformasi Pendidikan : 9 Pilar untuk Peningkatan Mutu Siswa [web log]. <https://hafecs.id/transformasi-pendidikan-9-pilar-untuk-peningkatan-mutu-siswa/>.
- Wahyuni, I., Andjani, T. R., & Setyawati, A. (2017, August 4). Ontologi pendidikan menurut beragam filsafat dunia: Idealisme, realisme, pragmatisme, eksistensialisme. Repository - Repository Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. <https://eprints.umsida.ac.id/568/>
- Widiansyah, A. (2018, September 2). Cakrawala - Jurnal Humaniora. e-Journal Bina Sarana Informatika. <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/cakrawala>
- (n.d.). Welcome to Digilib UIN Sunan Ampel Surabaya - Digilib UIN Sunan Ampel Surabaya. <https://digilib.uinsby.ac.id/398/4/Bab%201.pdf>